

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN SKPD DI KOTA JAMBI**

**Yudi<sup>1)</sup>, Sri Rahayu<sup>1)</sup>, Rahayu<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze and test empirically the factors of human resources, motivation, supporting facilities, organizational commitment, and communications to effectiveness of the preparation of financial statements SKPD in Jambi City. Sampling method used purposive sampling. Research used primary data was collected by questionnaires and processed with SPSS Programme. Research model testing used multiple linear regression. Hypothesis testing is done by simultaneous significant test, significant partial test, and coefficient of determinant. The result showed that human resources, motivation, supporting facilities, organizational commitment, and communications are able to explain the preparation of financial statements SKPD in Jambi City by 62,26%. In part, variables human resources, motivation, supporting facilities, organizational commitment, and Communications are show not significantly effect on the preparation of financial statements SKPD in Jambi City.*

*Keywords: Human Resources, Motivation, Supporting Facilities, Organization Commitment, Communication, effectiveness of the preparation of financial statement*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris faktor-faktor sumber daya manusia, motivasi, sarana pendukung, komitmen organisasi, dan komunikasi terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD di Kota Jambi. Populasi penelitian adalah SKPD di Kota Jambi. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Jenis data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan hasil data diproses melalui alat statistik yaitu SPSS. Model penelitian diperoleh melalui hasil analisis statistik multiple linear regression. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengujian signifikan simultan, signifikan parsial, dan koefisien determinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia, motivasi, sarana pendukung, komitmen organisasi, dan komunikasi mampu menjelaskan pengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD sebesar 62,26%. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Secara parsial variabel sumber daya manusia, motivasi, sarana pendukung, komitmen organisasi, dan komunikasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD.*

*Kata Kunci: Sumber daya manusia, motivasi, sarana pendukung, komitmen organisasi, komunikasi, efektivitas penyusunan laporan keuangan.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Terlebih dengan pelaksanaan IFRS di sektor publik adalah penerapan basis akrual. Perubahan menuju akuntansi berbasis akrual merupakan bagian dari proses mengadopsi pernyataan gaya bisnis sektor keuangan untuk sektor publik. Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa secara umum penerapan sistem akuntansi pada level provinsi sudah lumayan baik namun kabupaten/kota belum (zonalima.com, 2015).

Pernyataan Mendagri diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009: 2) mengungkapkan bahwa pada kenyataannya berdasarkan survey ke sejumlah pemerintah daerah dan informasi dari sejumlah konsultan keuangan daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah dan khususnya SKPD tidak langsung dapat menyusun laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah.

Dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah, masing-masing SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan pengguna anggaran dan melakukan tugas antara lain dari proses perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban. Peran dan fungsi SKPD menjadi sangat penting karena sebagai pengguna anggaran tiap SKPD melakukan hampir seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah selain pengawasan dan pemeriksaan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja membuat SKPD sebagai unit pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang benar-benar baik, artinya sesuai dengan kebutuhan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil akhir dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun

2010. LKPD yang disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah maka akan memenuhi tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi mudah menyingkap tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya. Pada dasarnya *good governance* dan akuntansi sektor publik mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan upaya elaborasi *good governance* ke tatanan yang lebih riil. Artikulasi dan elaborasi yang dimaksudkan dapat melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan audit atau pemeriksaan sektor publik. Ketiga alat ini sangat memperhatikan pilar-pilar *good governance* dalam *body of knowledge* yang telah dibangunnya. Dengan menerapkan ketiganya pada proses ekonomi atau operasi sektor publik maka di lapangan akan tercipta atmosfer *check and balance* (Mardiasmo, 2002:86).

Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam beberapa hal diantaranya adalah pola pengelolaan keuangan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disampaikan Kepala SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Tahap kedua, PPKD melakukan kompilasi laporan keuangan seluruh SKPD yang menjadi perangkat daerah termasuk di dalamnya laporan keuangan yang menjadi bagian PPKD sebagai SKPD. SKPD maupun SKPKD harus memberikan pernyataan dalam laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku dan diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Laporan keuangan yang disusun oleh PPKD setelah melalui proses persetujuan kepala daerah disebut sebagai laporan keuangan pemerintah daerah dan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP maka perlu diperhatikan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap SAP agar laporan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan. Susanto dan Darmawan (2009) melaporkan bahwa BPK mengalami kesulitan dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2008 karena banyak daerah yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya. Dalam ketentuan

seharusnya batas akhir penyerahan laporan keuangan 2007 ke BPK adalah Maret 2008, tetapi sampai dengan batas waktu, banyak laporan tidak selesai. Sementara menurut laporan Mawuntyas (2010), untuk laporan keuangan 2009, ketua BPK, Hadi Poernomo, mengatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan, mayoritas pemerintah daerah, masih tidak akurat melakukan pencatatan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan laporan yang tidak memadai.

Keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK tersebut tidak luput dari permasalahan yang timbul dari belum terselesaikannya laporan keuangan semua SKPD dalam suatu pemerintah daerah untuk diserahkan kepada PPKD yang kemudian dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Keterlambatan penyerahan laporan keuangan SKPD disebabkan oleh terdapatnya permasalahan atau kendala dalam proses penyusunannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dan memegang peranan paling besar dari penyusunan laporan keuangan. Meskipun didukung oleh sarana pendukung yang canggih, tetapi tanpa adanya SDM yang kompeten juga akan kurang optimal. Susanto dan Darmawan (2010) mengabarkan bahwa menurut BPK, menurunnya nilai laporan daerah terjadi karena masih rendahnya sumber daya manusia di pemerintah daerah yang bisa mengelola laporan keuangan. Ditambahkan oleh Afiah (2010), masih belum baiknya laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh adanya kelemahan SDM di bidang akuntansi dan audit di Pemda, karena sangat sedikit tenaga akuntan yang bekerja di sektor pemerintah daerah. Keadaan ini diperparah dengan tidak ditempatkannya SDM yang sesuai dengan bidangnya karena alasan yang kurang profesional.

Faktor selain SDM adalah motivasi terhadap penyusunan laporan keuangan yang kurang. Masih tingginya rasa malas dan menganggap mudah kewajiban yang dimiliki membuat penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi bertambah lama. Hal ini sependapat dengan ucapan Sekretaris BKD Kota Jambi, Vetmeizart Wetra, "Kita kan kebiasaan. Kalau belum didesak masih saja santai. Kalau sudah didesak, baru kebut-kebutan", (Jambi Independent, 2009).

Faktor sarana pendukung berupa aplikasi yang memadai dan berkualitas didukung dengan perangkat keras (hardware) yang canggih memiliki peran dalam menyusun laporan keuangan. Yudi (2016) berpendapat bahwa penggunaan sarana pendukung berupa teknologi dapat memudahkan pelaksanaan akuntansi pemerintahan di daerah dan mengurangi kesalahan perhitungan secara manual yang sering terjadi.

Simanjuntak (2005:1) mengungkapkan bahwa komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang, komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan

komitmen yang kuat akan kemungkinan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Hasil penelitian Azhar (2007) menyatakan bahwa ada pengaruh komitmen organisasi terhadap keberhasilan penerapan penyusunan laporan keuangan.

Warisno (2009), telah melaksanakan penelitian tentang "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi", penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Nawawi dan Martini (2004:167) pimpinan tidak hanya membuat komitmen atau keputusan, tetapi harus diterjemahkan menjadi gagasan, prakarsa, inisiatif, kreatifitas, pendapat, saran, perintah, dan lainnya yang sejenis itu melalui komunikasi yang baik. Hasil penelitian juga sejalan dengan yang diungkapkan Suranto (2005:57) dengan komunikasi yang baik maka seluruh komponen dalam SKPD dapat secara sistematis bekerja dalam satu arah yang sama yaitu untuk meningkatkan produktifitas instansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2010), Pengaruh Sumber Daya Manusia, Motivasi, Pelatihan, Peraturan, Dan Sarana Pendukung Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Malang dengan variabel independennya yaitu sumber daya manusia (SDM), motivasi, pelatihan, peraturan dan sarana pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia (SDM), motivasi, peraturan dan sarana pendukung memiliki pengaruh yang positif terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD, sedangkan variabel pelatihan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

## 1.2. Rumusan Masalah

Data di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Jambi didukung oleh laporan keuangan SKPD yang belum memuaskan secara kualitas. Untuk itu, penelitian ini dilakukan kepada SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan SKPD". Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mahardika (2010), dengan variabel independennya yaitu sumber daya manusia (SDM), motivasi, pelatihan, peraturan dan sarana pendukung. Perbedaan penelitian ini terletak pada daerah penelitian, periode waktu penelitian, jumlah sampel dan variabel yang digunakan dengan

menambah dua variabel baru yaitu komitmen organisasi dan komunikasi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1. Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1. Sumber Daya Manusia**

Menurut McLeod (1996), personil merupakan salah satu sumber daya fisik yang mengalir melalui perusahaan, dan departemen sumber daya manusia berperan penting dalam arus tersebut. Untuk itu, dalam setiap organisasi seharusnya memiliki sumber daya manusia berkualitas dengan didukung latar belakang pendidikan yang sesuai bidang keahliannya dan mempunyai pengalaman yang dapat membantu dalam penyelesaian pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan ilmu yang dikuasainya akan berdampak pada kekeliruan hasil keluaran (*output*) seperti yang diharapkan.

Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, baik itu laporan keuangan perusahaan maupun laporan keuangan pemerintahan.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Namun akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait dengan latar belakang pendidikan di lingkungan pemerintahan khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa SDM yang bukan berlatarbelakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Nazier, 2009).

#### **2.1.2. Motivasi**

Robbins (1996) menjelaskan bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Sementara Hariandja (2002) mengartikan motivasi sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah.

Menurut Effendy (2001), pada dasarnya motivasi dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu: 1) motivasi materi, seperti barang-barang dan uang, 2) motivasi semi materi, seperti kesehatan, dan 3) motivasi non

materi, seperti promosi, pekerjaan terjamin, kondisi kerja baik, fasilitas rekreasi, dan pujian.

#### **2.1.3. Sarana Pendukung**

Penyediaan sarana pendukung yang baik berguna dalam upaya mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Sarana pendukung yang digunakan adalah berhubungan dengan pemanfaatan teknologi yang berkembang secara pesat pada masa sekarang ini. Menurut Mulyadi (2001), produktivitas karyawan sangat ditentukan oleh teknologi yang disediakan bagi karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Ketertinggalan teknologi akan mengakibatkan penurunan produktivitas personel, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kapabilitas karyawan dalam menyediakan value terbaik. Sarana pendukung berupa teknologi yang dimaksud adalah mengarah pada ketersediaan perangkat keras (komputer) dan perangkat lunak (*software/aplikasi*).

Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah daerah, yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sebagai entitas pelaporan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi, sehingga kedua satuan kerja ini dalam peningkatan kinerjanya dituntut untuk menggunakan Teknologi Informasi (TI). Sarana pendukung berupa teknologi yang dimaksud adalah mengarah pada ketersediaan perangkat keras (komputer) dan perangkat lunak (*software/aplikasi*).

#### **2.1.4. Komitmen Organisasi**

Organisasi berdasarkan Kepmendagri 13 tahun 2006 adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Organisasi yang baik merupakan organisasi yang terstruktur, punya tujuan, punya anggota atau sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab, komitmen, moral, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berkesinambungan. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.

Memiliki komitmen organisasional merupakan elemen penting dalam bekerja di organisasi pemerintahan. Seseorang dengan memiliki komitmen organisasional di organisasi pemerintah dapat diharapkan memiliki pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi. *Goal setting theory* menyatakan bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi.

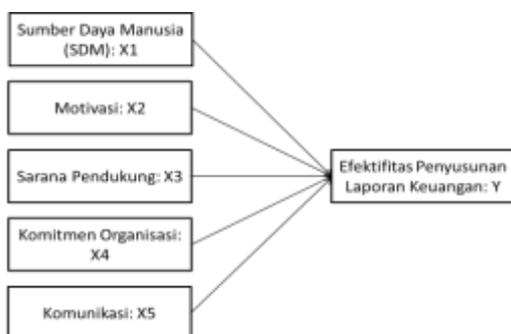
### 2.1.5. Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *communis*, yang berarti bersama. Menurut Herbert (1981) dalam Suranto (2005:15) mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Menurut Arep dan Tanjung (2004:81) komunikasi adalah informasi mengalir secara bebas dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dalam pengelolaan daerah suatu SKPD, komunikasi yang baik dan lancar antara pengguna anggaran dengan bawahannya atau sebaliknya sangat dibutuhkan dalam menyamakan persepsi untuk menyusun dan merumuskan serta melaksanakan dengan baik rencana kerja yang ingin dicapai oleh SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Kemampuan berkomunikasi secara efektif bagi seorang pimpinan erat kaitannya dengan kepemimpinan yang berwibawa. Kalau seorang pimpinan ingin memiliki kepemimpinan yang berwibawa, maka ia perlu mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif. Kemahiran komunikasi bagi seseorang pimpinan dapat diperkecil, bahkan menghilangkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi (Effendy, 1989:134). Untuk itulah komunikasi yang baik dan lancar tersebut selalu ditumbuh kembangkan dalam instansi pemerintah yang salah satunya dengan cara melibatkan para pejabat dan staf dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu keputusan atau hal-hal penting dalam instansi, terlebih khusus tentang pengelolaan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### 2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang ditetapkan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyusunan laporan keuangan di SKPD dapat digambarkan sebagai berikut.



### 2.3. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Variabel SDM berpengaruh terhadap efektifitas penyusunan laporan keuangan

H<sub>2</sub>: Variabel Motivasi berpengaruh terhadap efektifitas penyusunan laporan keuangan

H<sub>3</sub>: Variabel Sarana Pendukung berpengaruh terhadap efektifitas penyusunan laporan keuangan

H<sub>4</sub>: Variabel Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap efektifitas penyusunan laporan keuangan

H<sub>5</sub>: Variabel Komunikasi berpengaruh terhadap efektifitas penyusunan laporan keuangan

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2007). Kuesioner tersebut dilengkapi dengan petunjuk pengisian. Pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk pernyataan yang bersifat tertutup dengan tujuan memudahkan proses analisis data secara statistik. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk bersifat kuantitatif oleh karena itu banyak pertanyaan tertutup agar memudahkan pengukuran respon. Skala pengukuran adalah lima poin skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Penelitian menggunakan 15 SKPD yang diberikan dua kuesioner yang akan diisi oleh aparat pemerintah daerah di bidang keuangan SKPD masing-masing.

### 3.2. Variabel Penelitian

Variabel yang diamati ada dua jenis. Pertama variabel dependen (Y) dan kedua, variabel independen (X). Variabel pertama adalah efektifitas penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu penyampaian pelaporan keuangan dari SKPD tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti SAP, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan lain sebagainya yang relevan.

Variabel kedua, variabel independen terdiri dari variabel Sumber daya Manusia, Motivasi, Saran Pendukung, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik dengan bantuan program SPSS. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Pengujian validitas menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Ancok, 1998:120).

Untuk menentukan hubungan yang berlaku antara sumber daya manusia, motivasi, pelatihan, peraturan, sarana pendukung, komitmen organisasi dan komunikasi terhadap efektivitas penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada pemerintah Kota Jambi. Analisis statistik yang digunakan adalah persamaan regresi linier dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

Y = efektivitas penyusunan laporan keuangan

X<sub>1</sub> = sumber daya manusia

X<sub>2</sub> = motivasi

X<sub>3</sub> = sarana pendukung

X<sub>4</sub> = komitmen organisasi

X<sub>5</sub> = komunikasi

b<sub>0</sub> = konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub> = koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> sampai X<sub>5</sub>

e = error random

Pengujian Signifikan Simultan (Uji-F). Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya:

H<sub>0</sub>: b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub> = 0, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H<sub>a</sub>: b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub> ≠ 0, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika probabilitas ≤ 0.05, maka diterima.

Jika probabilitas > 0.05, maka ditolak.

Pengujian Signifikan Parsial (Uji-t). Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah: H<sub>0</sub>: b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub> = 0, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H<sub>a</sub>: b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub> ≠ 0, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan. Jika probabilitas ≤ 0.05, maka diterima. Jika probabilitas > 0.05, maka ditolak.

Pengujian koefisien determinan (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen (Ghozali, 2006).

Selanjutnya, Ghozali (2006) menerangkan bahwa koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ ≤ 1). Hal ini berarti bila = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel dependen dan bila semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Jambi dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Masa periode jabatan mereka adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode. Bupati dan wakil bupati melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Sekertariat Daerah (Sekda) untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sekda dibantu oleh kepala dinas dan kepala badan di wilayah Kota Jambi yang disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur kelembagaan pemerintah Kota Jambi terdiri dari: Badan = 5 SKPD, Dinas = 20 SKPD, Inspektorat = 1 SKPD, Sekretariat DPRD = 1 SKPD, dan SKPD kecamatan terdiri dari 11 kecamatan.

Jumlah kuesioner secara keseluruhan yang dibagikan kepada responden adalah 50 kuesioner. Hasil pengembalian kuesioner dari responden tersebut dapat dilihat dari tabel .1 sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Kondisi Kuesioner**

No	Kondisi Kuesioner	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	50
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	4
3	Kembali dengan isi jawaban yang tidak lengkap	4
4	Jumlah Kuesioner yang kembali dengan jawaban lengkap dan dapat diolah	42

Hasil jawaban responden yang layak untuk dianalisis lebih lanjut adalah berjumlah 42 kuesioner sesuai hasil pada tabel di atas. Empat kuesioner yang kembali namun tidak digunakan tersebut disebabkan beberapa pernyataan kuesioner tidak diisi oleh responden.

Identitas responden diperoleh dari hasil pengisian data pribadi dalam kuesioner yang meliputi karakteristik umur, jenis kelamin, jabatan, dan pendidikan. Jenis kelamin dibagi menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Umur dibagi menjadi 6 kelompok yaitu ≤ 30 tahun, 31-35

tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, dan > 50 tahun. Jabatan dibagi menjadi 7 kelompok yaitu Sekretaris Dinas/Badan, Kabag, Kasubbid, Kasubbag, Bendahara, PPK, dan Staf. Latar belakang pendidikan responden dibagi menjadi 4 yaitu Pascasarjana, Sarjana, Diploma, dan SMA/SMK.

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai rata-rata (mean) dan Standard deviation (simpangan baku) data yang digunakan dalam penelitian. Data statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2.**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y EFEKTIFITAS LAP. KEUANGAN	4,0595	0,26943	42
X1 (SDM)	3,1507	0,32952	42
X2 (MOTIVASI)	4,2976	0,41038	42
X3 SARANA PENDUKUNG	3,6119	0,58009	42
X4 KOMITMEN ORGANISASI	4,0060	0,45023	42
X5 KOMUNIKASI	3,7262	0,48392	42

#### 4.2. Pembahasan

Jumlah sampel (n) yang digunakan adalah 42 responden. Variabel SDM ( $X_1$ ) memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi berarti menunjukkan responden cenderung beranggapan bahwa para pegawainya telah memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam menyusun laporan keuangan SKPD, sehingga memungkinkan ada pengaruhnya terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.

Variabel motivasi ( $X_2$ ) memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dari SDM berarti menunjukkan responden cenderung beranggapan bahwa para pegawainya telah memiliki dorongan yang kuat dari diri mereka sendiri untuk menyusun laporan keuangan SKPD agar sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mengindikasikan terdapat pengaruhnya terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.

Variabel sarana pendukung ( $X_3$ ) memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi berarti menunjukkan responden cenderung mengatakan bahwa komputer dan aplikasi yang disediakan telah membantu para pegawainya menyusun laporan keuangan SKPD menjadi lebih baik, sehingga memungkinkan ada pengaruhnya terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.

Variabel komitmen organisasi ( $X_4$ ) memiliki nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa komitmen organisasi yang dimiliki oleh para pegawai akan lebih memotivasi untuk berusaha mencapai tujuan organisasi dan mampu mengarahkan penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi lebih baik, sehingga memungkinkan terdapat pengaruhnya terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.

Variabel komunikasi ( $X_5$ ) memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi menunjukkan bahwa responden cenderung setuju komunikasi yang terjalin dengan baik oleh antara pimpinan dan bawahan, dan seluruh komponen dalam SKPD dapat secara sistematis bekerja dalam satu arah yang sama akan mampu mengarahkan penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi lebih baik, sehingga memungkinkan terdapat pengaruhnya terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.

Variabel efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD (Y) memiliki nilai rata-rata yang tinggi berarti responden cenderung beranggapan bahwa para pegawai telah berhasil menyampaikan dan melaporkan semua informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan SKPD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengujian jawaban responden melalui korelasi Pearson (*Product Moment*) dengan mengambil nilai kritis sebesar 0,256 dan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. r hitung variabel  $X_1$  dan variabel Y adalah 0,342. Angka ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel  $X_1$  dan Y. r hitung variabel  $X_2$  dan variabel Y adalah 0,360. Angka ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel  $X_2$  dan Y. r hitung variabel  $X_3$  dan variabel Y adalah 0,282. Angka ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel  $X_3$  dan Y. r hitung variabel  $X_4$  dan variabel Y adalah 0,487. Angka ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel  $X_4$  dan Y. r hitung variabel  $X_5$  dan variabel Y adalah 0,526. Angka ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel  $X_5$  dan Y.

Nilai variabel  $X_1$  dengan Sig. (1-tailed) = 0,013 menunjukkan hubungan yang signifikan karena  $0,001 < 0,05$  dimana 0,05 merupakan taraf signifikan. Nilai variabel  $X_2$  dengan Sig. (1-tailed) = 0,010 menunjukkan hubungan yang signifikan karena  $0,001 < 0,05$  dimana 0,05 merupakan taraf signifikan. Nilai variabel dengan Sig. (1-tailed) = 0,035 menunjukkan hubungan yang signifikan karena  $0,001 < 0,05$  dimana 0,05 merupakan taraf signifikan. Nilai variabel  $X_4$  dengan Sig. (1-tailed) = 0,001 menunjukkan hubungan yang signifikan karena  $0,001 < 0,05$  dimana 0,05 merupakan taraf signifikan. Dan nilai variabel  $X_5$  dengan Sig. (1-tailed) = 0,000 menunjukkan hubungan yang signifikan karena  $0,001 < 0,05$  dimana 0,05 merupakan taraf signifikan.

Berdasarkan hasil pengujian jawaban responden melalui metode *Cronbach Alpha* dengan mengambil batas reliabel sebesar 0,6 Hasil pengujian pada koefisien determinasi (R) penelitian ini diperoleh R sebesar 0,626. Hal ini menunjukkan bahwa variabel SDM, Motivasi, Sarana Pendukung, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi mempunyai pengaruh kuat terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD. Sementara itu  $R^2$  sebesar 0,392 atau 39,2% yang eberarti bahwa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 39,2% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel Y adalah 60,8%.

Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memerhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel terhadap variabel dependen. Nilai uji F sebesar 4,634 dengan signifikansi 0,002. Dimana disyaratkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD (Y). Hal tersebut berarti jika variabel SDM ( $X_1$ ), motivasi ( $X_2$ ), sarana pendukung ( $X_3$ ), komitmen organisasi ( $X_4$ ), dan komunikasi ( $X_5$ ) secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak pada kenaikan efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD (Y), sebaliknya jika SDM ( $X_1$ ), motivasi ( $X_2$ ), sarana pendukung ( $X_3$ ), komitmen organisasi ( $X_4$ ), dan komunikasi ( $X_5$ ) mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD (Y).

Pengujian terhadap pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) dilakukan dengan membandingkan nilai Sig masing-masing variabel bebas dengan taraf signifikansi 0,05. Koefisien masing-masing variabel bebas (X) akan mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) Jika Sig masing-masing variabel  $< 0,05$ .

Koefisien variabel  $X_1$  sebesar -0,015 menunjukkan bahwa setiap penurunan satu nilai pada variabel  $X_1$  akan memberikan penurunan sebesar -0,015. Koefisien variabel  $X_1$  tidak memengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel  $X_1$  sebesar 0,916 yang lebih besar daripada 0,05 ( $0,916 > 0,05$ ).

Koefisien variabel  $X_2$  sebesar 0,114 menunjukkan bahwa setiap penurunan satu nilai pada variabel  $X_2$  akan memberikan penurunan sebesar 0,114. Koefisien variabel  $X_2$  tidak memengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel  $X_2$  sebesar 0,257 yang lebih besar daripada 0,05 ( $0,257 > 0,05$ ).

Koefisien variabel  $X_3$  sebesar 0,118 menunjukkan bahwa setiap penurunan satu nilai pada variabel  $X_3$  akan memberikan penurunan sebesar 0,118. Koefisien variabel  $X_3$  tidak memengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel  $X_3$  sebesar 0,105 yang lebih besar daripada 0,05 ( $0,105 > 0,05$ ).

Koefisien variabel  $X_4$  sebesar 0,137 menunjukkan bahwa setiap penurunan satu nilai pada variabel  $X_4$  akan memberikan penurunan sebesar 0,137. Koefisien variabel  $X_4$  tidak memengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel  $X_4$  sebesar 0,211 yang lebih besar daripada 0,05 ( $0,211 > 0,05$ ).

Koefisien variabel  $X_5$  sebesar 0,161 menunjukkan bahwa setiap penurunan satu nilai pada variabel  $X_5$  akan memberikan penurunan sebesar 0,161. Koefisien variabel  $X_5$  tidak memengaruhi secara signifikan

terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel  $X_5$  sebesar 0,115 yang lebih besar daripada 0,05 ( $0,115 > 0,05$ ).

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,039 - 0,15X_1 + 0,114X_2 - 0,118X_3 + 0,137X_4 + 0,161X_5$$

Dimana:

$X_1$  adalah SDM,  $X_2$  adalah Motivasi,  $X_3$  adalah Sarana Pendukung,  $X_4$  adalah Komitmen Organisasi, dan  $X_5$  adalah Komunikasi. Y adalah efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Hasil analisa data dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel SDM, motivasi, sarana pendukung, komitmen organisasi, dan komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Secara parsial variabel SDM, motivasi, sarana pendukung, komitmen organisasi, dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan laporan keuangan SKPD.

### 5.2. Saran

1. Pemerintah daerah melalui SKPD sebaiknya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparat yang menyusun laporan keuangan.
2. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada aparat yang bekerja dengan prestasi baik dalam menyusun laporan keuangan SKPD melalui insentif atau tunjangan lainnya untuk menjaga motivasi aparat.
3. Pemerintah daerah memberikan sarana pendukung yang memadai agar aparat dapat menjalankan aplikasi keuangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan SKPD.
4. Sebagai bentuk komitmen organisasi, Pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan penempatan aparat sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan.
5. Komunikasi yang baik perlu dibudayakan dalam organisasi diantaranya melibatkan pimpinan dan staf dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan terutang yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
6. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup seluruh aparat yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Afiah, N. N. 2010. *Laporan Keuangan Pemda Belum Baik*. Harian Pikiran Rakyat. (Online). <http://ahmadheryawan.com> diakses tanggal 31 Mei 2010.
- Ancok, D. 1998. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arep, I. dan H. Tanjung. 2004. *Manajemen Motivasi*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Grasindo.
- Azhar. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis (S2). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Effendy, R. 2001. *Dasar-dasar Manajemen Modern*. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Effendy, O. U. 1989. *Psikologi Manajemen dan Administrasi*. Cetakan ketiga. Mandar Maju, Bandung.
- Hariandja, M. T. E. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: Grasindo.
- Jambi Independent. 2009. BPK Desak Dinas Sampaikan laporan. <http://www.jambi.bpk.go.id/?p=896>
- Mahardika, N. F. (2010). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Motivasi, Pelatihan, Peraturan, Dan Sarana Pendukung Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Malang*. Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Maryoto,
- Mawuntyas, D. 2010. *Mayoritas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Perlu Perbaikan*. *Tempo Interaktif*. (Online). <http://www.tempointeraktif.com> diakses tanggal 13 Desember 2010.
- McLeod, R. 1996. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Nasution, S. I. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Di Pemerintahan Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Nawawi, H. H. dan Martini H.M. 2004. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Cetakan keempat. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazier, D. 2009. *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*. Makalah Seminar Nasional.
- Robbins, S. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Simanjuntak, H. B. 2005. *Jiwasraya Magazine*. Edisi November.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suranto, AW. 2005. *Komunikasi Perkantoran*. Cetakan Pertama, Media Wawancara Yogyakarta.
- Susanto, H. dan A.D. Darmawan. 2009. *BPK Kesulitan Periksa Keuangan Daerah*. *Vivanews*. (Online). <http://www.vivanews.com> diakses tanggal 13 Desember 2010.
- Warisno. (2009). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Yudi, Y., Sudarma, M., Djamhuri, A., & Baridwan, Z. (2016). *The meaning behind accrual accounting at a local government in Indonesia*. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 58(10).
- Zonalima.com. 2015. *Penerapan Sistem Akuntansi Akrua di Daerah Belum Optimal*. <http://www.kemendagri.go.id/news/2015/11/24/pe-nerapan-sistem-akuntansi-akrua-di-daerah-belum-optimal>